

02 GOVERNMENT TODAY
Sekolah Tak Jadi Libur Ramadan Satu Bulan

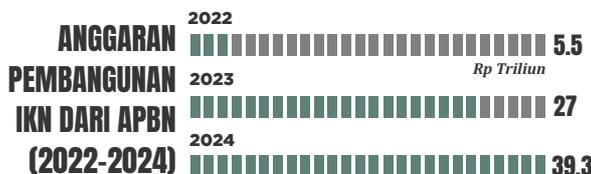
05 NUSANTARA
Soal Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi Kemendikti: Perlu Dikaji Lebih Dalam

08 FAMILY
Makanan yang Tak Aman Dipanaskan dengan Microwave



Kebakaran Hantui Jakarta Di Kemayoran Hanguskan 543 Bangunan

Rentetan kebakaran terjadi di Jakarta pada bulan pertama tahun 2025 ini. Terbaru, sebanyak 543 bangunan di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, dilalap si jago merah pada Selasa (21/1/2024) dini hari. Bangunan yang terbakar menyebar di 11 RT pada RW 04. Adapun kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Saat ini, jumlah pengungsi terdata sebanyak 1.797 jiwa dalam 607 Kepala Keluarga (KK). Namun, belum diketahui secara pasti terkait jatuhnya korban jiwa maupun luka dalam tragedi tersebut. Sebelumnya kebakaran hebat melanda Clodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat. Total kantong jenazah yang diterima oleh RS Polri Kramat Jati hingga Selasa menjadi sembilan. Diketahui ada 14 laporan orang hilang dalam kejadian itu. (ist.antara)



Sumber :
Kementerian
keuangan RI

TITAH PRABOWO: KAJI ULANG DESAIN IKN



Dana Rp 48,8 T untuk IKN

- Untuk pembangunan tahap dua di IKN yaitu kompleks legislatif seperti Gedung DPR, yudikatif seperti Gedung Mahkamah Agung, dan komponen pendukungnya.
- Anggaran juga akan dipakai untuk memelihara bangunan yang sudah ada di IKN yaitu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga apartemen ASN yang sudah dibangun lebih dulu oleh Kementerian PU.

Libatkan Swasta

- Ada pembiayaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,239 triliun.
- Dana digunakan untuk membangun 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, 6 KPBU jalan dan terowongan di KIPP IKN, PLTS 50 MW, serta sarana peribadatan.
- Ada groundbreaking ke-9 untuk pembangunan hotel, ritel, hingga perkantoran dengan nilai investasi Rp 6,49 triliun yang digarap swasta murni.

Presiden Prabowo Subianto memberikan titah kepada Bos Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk mengkaji ulang desain IKN. Hal ini usai penatapannya sebagai ibu kota politik yang ditargetkan terealisasi pada 2028. Artinya, pembangunan di IKN akan lebih difokuskan untuk gedung-gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk itu, Prabowo menyetujui anggaran untuk pembangunan tahap dua di IKN senilai Rp 48,8 triliun. Anggaran tersebut akan dipakai mulai 2025 hingga 2029 yang sumbernya dari APBN. Selain dari APBN, pembangunan IKN tahap dua ini juga akan dibiayai oleh Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,239 triliun. Dana itu digunakan untuk membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak yang saat ini dalam proses feasibility study (FS) atau studi kelayakan. Apapun perubahannya yang pasti dataran hijau makin berkurang. Dalam sorotan Lembaga Antariksa Amerika Serikat (AS) atau National Aeronautics and Space Administration (NASA) terbaru, dirilis tampilan perbedaan kenampakan wilayah IKN di tahun 2022 dan 2024.

Baca Hal 11....

Sekolah Tak Jadi Libur Ramadan Satu Bulan

JAKARTA-Teka-teki libur Ramadan untuk anak sekolah akhirnya terjawab. Pemerintah mengeluarkan surat edaran yang intinya batal meliburkan siswa selama satu bulan penuh.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu bernomor 2 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025 dan nomor 400.1/ls20ISJ.

Dalam SK 3 menteri yang diteken di Jakarta, 20 Januari 2024 itu, libur sekolah hanya berlaku di awal Ramadan. Adapun yang dimaksud libur di awal Ramadan yakni tanggal 27-28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025.

"Tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah/ madrasah/ satuan pendidikan keagamaan," dikutip dari surat edaran tersebut.

Kemudian proses belajar mengajar dilanjutkan pada 6 sampai 25 Maret 2025. "Tanggal 6 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah/ madrasah/ satuan pendidikan keagamaan. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama," tulis edaran tersebut.

Bagi peserta didik yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia.

Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Siswa sekolah masuk kembali pada 9 April 2025.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun membeberkan alasan keputusan itu. "Bagaimana agar peningkatan kualitas pembelajaran dapat dipertahankan. Kemudian juga bagaimana murid-murid kita tetap bisa belajar dengan baik walaupun di bulan suci Ramadan," ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti kepada



wartawan di Gedung A Kemendikdasmen, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Keputusan ini, lanjut Mu'ti, karena pihaknya melihat banyak aspirasi dari orang tua agar Ramadan tidak sepenuhnya libur. Tapi tetap ada pembelajaran.

"Dan kegiatan di rumah pun ketika mereka sedang tidak belajar di sekolah juga tetap diberikan tugas-tugas terstruktur oleh guru," jelasnya.

Pembelajaran selama Ramadan akan disesuaikan. Kebijakan ini nantinya akan diberikan kepada pemerintah daerah.

"Tapi lamanya belajar di sekolah kami berikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk menyusun jadwal pembelajaran selama bulan suci Ramadan," ujarnya.

Sebelumnya, wacana pemerintah akan meliburkan sekolah selama satu bulan penuh saat bulan Ramadan tahun 2025 pertama kali disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i.

Dia membenarkan bahwa memang ada wacana untuk kembali menerapkan kebijakan yang sempat diterapkan di era Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Libur sebulan pada masa Ramadan bagi sekolah dan kampus sudah pernah diterapkan di Indonesia. Menurut sejarah, libur diterapkan pada zaman kolonial Belanda dan Orde Lama.

Pada era Orde Baru ditiadakan, lalu berlaku lagi pada era Presiden Gus Dur. Lalu ditiadakan lagi hingga kini. Selama libur sebulan, sekolah bisa

Jadwal Sekolah saat Ramadan Berdasarkan SKB 3 Menteri

-  27-28 Februari 2025 dan 3-5 Maret 2025: Libur awal Ramadan
-  6-25 Maret 2025: Sekolah masuk dengan jam belajar disesuaikan/diatur Pemda
-  26 Maret-8 April 2025: Libur Idul Fitri dan Cuti Bersama
-  9 April 2025: Siswa sekolah masuk kembali

Jadwal Libur Idul Fitri Tahun 2025 Berdasarkan SKB 3 Menteri

-  31 Maret - 1 April 2025: Libur Idul Fitri
-  2-4 April 2025: Cuti bersama Idul Fitri
-  5-6 April 2025: Libur akhir pekan
-  7 April 2025: Cuti bersama tambahan

memberlakukan pesantren kilat. Pada Pilpres 2019, capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berjanji akan menerapkan libur sebulan selama Ramadan bila menang. (din, ant, rls/dya)

Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan, Bakal Dibawa Pulang

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan berjalan sepanjang bulan Ramadan.

Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, pembagian MBG akan diberikan saat pulang sekolah. Sementara untuk para santri akan dibagikan ketika waktu berbuka puasa.

"Tetap (dilaksanakan selama Ramadan). Nanti anak sekolah yang masuk pagi, pada saat pulang kami akan bagikan makanan yang bisa dimakan sore hari. Bagi mereka yang di pesantren, nanti akan makan pada saat berbuka," kata Dadan kepada wartawan, di Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Dadan melanjutkan, makanan itu akan dibawa pulang oleh para murid. Bagi yang berpuasa bisa memakannya setelah adzan Magrib.

"Baik (murid) yang puasa maupun tidak puasa akan membawa makanan pulang ke rumah. Yang muslim akan dimakan pada sore hari (saat berbuka), yang non-muslim pasti langsung dimakan," tuturnya.

Selain menyediakan layanan makan bergizi, Dadan mengatakan BGN juga bertugas untuk memastikan kebutuhan kalori setiap murid terpenuhi. Termasuk komposisi gizi sudah terpenuhi atau pun belum.

"Kami menetapkan standar tinggi. Jadi standar kami ketika

melakukan program makan bergizi yang pertama adalah kebutuhan kalori setiap penerima manfaat harus terpenuhi, itu program kami," kata akademisi IPB tersebut.

Kebersihan dan pelayanan terbaik juga menjadi salah satu standar yang telah ditetapkan BGN guna memastikan keamanan pangan.

"Ketiga higienisnya harus dipenuhi terutama di seluruh satuan pelayanan dan keempat adalah keamanan pangannya. Jadi setiap kali kami mengirimkan makanan ke sekolah atau ke pesantren atau ke ibu hamil maka setiap kali sampelnya kami simpan di satuan pelayanan selama 24 jam," imbuh dia. (din, ist, ant/dya)

DPR: Hak Guna Bangunan di Laut Aneh!

JAKARTA - Terbitnya sertifikat hak guna bangunan (HGB) di atas laut dinilai janggal dan aneh. Diketahui, Kementerian ATR/BPN selaku penerbit HGB memiliki hak atas tanah daratan, tapi tidak untuk laut.

"Kalau ada HGB di atas laut, itu menjadi aneh. Karena HGB itu kan kewenangan Kementerian ATR/BPN yang memang hanya untuk tugas pokok fungsinya adalah memberikan hak atas tanah daratan di luar kawasan kehutanan," ujar Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Herman Khaeron di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Ditegaskan, terbitnya sertifikat HGB di pagar sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang adalah hal yang aneh.

Herman menyebut semua pihak memang belum ada yang tahu secara pasti apa yang terjadi terkait dengan pemagaran di laut Tangerang ini. Namun yang pasti, menurut dia, pemagaran laut ini melanggar undang-undang (UU).

"Memang harus open access. Sebagai common property, maka laut open access. Oleh karenanya, ketika kemudian ada yang meng-kavling tanpa ada landasan hukum yang pasti, maka itu melanggar," tuturnya.

"Namun ya tentu ini yang mengetahui kan pihak-pihak tertentu. Tinggal ke mana nanti siapa yang tentu mengeluarkan kebijakan ini. Kan harus ada (yang ditindak), harus tuntas lah," sambung Herman.

Sementara itu, Herman menyebut pagar laut Tangerang perlu diinvestigasi karena telah menyita perhatian publik.

Dalam satu minggu ke depan, kata dia, komisi terkait di DPR akan bergerak mendalami perihal pagar laut Tangerang. "Jadi nanti kita lihat aja prosesnya. Namun ya aparat penegak hukum semestinya juga sudah melakukan investigasi gitu. Kalau memang itu adalah menjadi area ke depan ini menjadi area reklamasi, ya silakan tempuh, tempuh peraturan perundang-undangan secara benar gitu," imbuhnya.

Senada, Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dalang yang menyebabkan adanya pagar laut di pantai utara kawasan Tangerang, Banten.

Dia mengatakan keberadaan pagar laut di pesisir Banten tersebut telah membuat kegaduhan di publik. Tak hanya berimbas pada berbagai isu liar, pagar laut tersebut juga akan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam hal pemberian izin pengelolaan ruang laut, tanah, hingga penegakan hukum.

"Pagar laut ini sudah sangat menjadi perhatian publik dan memunculkan kegaduhan. Beruntung Presiden Prabowo segera memerintahkan pembongkaran



Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut di kawasan Muara Tawar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1/2024).
DOK. Kementerian Kelautan dan Perikanan

sehingga niat atas pembuatan pagar laut itu terpatahkan," kata Rahmat di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Menurut dia, pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang mengakui pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer di Tangerang, sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), secara jelas telah membuktikan terjadinya pelanggaran atas pengelolaan wilayah laut untuk kepentingan bisnis.

Hal itu, kata dia, diperkuat dengan pernyataan Menteri Kelautan dan

Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan pagar laut di perairan Tangerang, Banten tersebut adalah ilegal.

Terbaru, usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri KKP menyampaikan pembongkaran pagar laut itu akan dilaksanakan Rabu (22/1) bersama TNIAL.

Seharusnya, kata dia, HGB diterbitkan setelah reklamasi dilakukan dan melalui permohonan. Maka adanya 263 bidang tanah di atas pagar laut di Tangerang yang punya

Sertifikat HGB yang dimiliki beberapa perusahaan tentu menurutnya menjadi tanda tanya besar.

"Ini sejarah baru dimana HGB muncul sebelum reklamasi yang notabenehnya harus melalui berbagai syarat, salah satunya izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh KKP. Karenanya saya mendorong dibentuk Pansus DPR terhadap pagar laut Banten ini," kata dia.

Kementerian ATR/BPN memeriksa jajaran Kanwil ATR/BPN Banten dan Tangerang terkait HGB di laut Tangerang, Banten. Kakanwil ATR/BPN Banten dan Kepala Pertanahan Kabupaten Tangerang dimintai keterangan langsung oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengenai terbitnya HGB di kawasan laut yang dibentengi pagar bambu di Kabupaten Tangerang.

"Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten sudah memenuhi panggilan rapat bersama Kementerian ATR/BPN. Data, dan informasi seputar pemberitaan dimaksud yang telah dilaporkan atau disampaikan langsung ke Kementerian ATR/BPN," ujar Kasubag Humas ATR/BPN Banten, Muti, melalui pesan singkatnya, Selasa (21/1/2025). (din, ant, ist rla/dya)

Terungkap! 656 Ha Laut Surabaya-Sidoarjo Kantongi HGB

DOSEN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Thanthowy Syamsuddin, mengungkap temuannya adanya Hak Guna Bangunan (HGB) lahan di atas perairan timur Surabaya-Sidoarjo.

Thanthowy menemukan HGB dengan total luas 656 hektare, tepatnya di koordinat 7.342163°S, 112.844088°E, 7.355131°S, 112.840010°E dan 7.354179°S, 112.841929°E.

"Awalnya ramai pagar laut Tangerang, ya lalu Ci Elisa di Twitter itu ngecek ke ATR Bhumi, saya memang familiar dengan aplikasi itu dari ATR BPN saya cek daerah-daerah Jawa Timur lah ya, di Sidoarjo-Surabaya sebenarnya itu wilayah administrasi Sidoarjo tapi tepat di timur Ekowisata Mangrove Gunung Anyar, saya cek ternyata ada tiga petak lahan HGB, yang saya total itu waktu kemarin itu 656 hektare," ujar Thanthowy saat dikonfirmasi, Selasa (21/1/2025).

"Nah Ketika saya cek ini valid dari aplikasi Tata Ruang BPN sendiri itu, terus saya quote tweet, saya berikan linknya semuanya koordinatnya, screenshot-nya termasuk saya kroscek ke aplikasi Google Earth," lanjutnya.

Dari hasil penelusurannya itu, kata Thanthowy, lahan yang tercatat berstatus HGB di area perairan, sama seperti kasus yang ada di laut Tangerang.

"Di Google Earth, sebenarnya ya daerah itu laut, sama daerah-daerah perikanan tambak dan mangrove, jadi enggak ada daratan, ya perairan gitu sama kayak case Tangerang berarti," ucapnya.

Ia mengungkapkan, jika temuan HGB itu benar, maka hal itu telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XI/2013.

Selain itu, HGB tersebut bertentangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menerangkan area tersebut diperuntukkan bagi perikanan, bukan zona komersial atau permukiman.

"Sebenarnya ini yang harus dikonfirmasi atau yang harus diverifikasi oleh pemerintah. Kenapa ada pemanfaatan ruang di atas perairan, yang mana itu bertentangan dengan putusan MK," ujarnya.

Thanthowy mendesak pemerintah untuk transparan siapa pemilik HGB tersebut. Sebab, saat ia mengecek aplikasi Bhumi, tidak ada informasi kepemilikan.

"Pemerintah harus mengungkap



Tangkapan layar Hak Guna Bangunan (HGB) lahan di atas perairan timur Surabaya-Sidoarjo di aplikasi Bhumi.

itu sebenarnya punya siapa HGB itu. Saya berharap hal yang terjadi di Tangerang itu tidak terjadi di Jawa Timur, terutama area pesisir, yang mana itu titik untuk area konservasi, lingkungan, pencegahan abrasi mungkin juga aspek perikanan bagi para nelayan," katanya.

"Kalau aplikasi Bhumi itu enggak nemu pemanfaatnya siapa, cuma nemu itu status HGB SHM dan seterusnya," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jatim, Lampri, mengatakan bahwa temuan peta HGB tersebut tidak masuk di wilayah Surabaya, melainkan di wilayah Sidoarjo. "Di Surabaya enggak ada. Iya benar (masuk wilayah Sedati, Sidoarjo)," kata Lampri. (ama, rls, ist rla/dya)

Karna Suswandi Resmi Ditahan terkait Korupsi Dana PEN di Situbondo

JAKARTA - KPK telah memeriksa Bupati Situbondo Karna Suswandi sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Pemkab Situbondo periode 2021-2024. KPK kini resmi menahan Suswandi.

Pantauan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025), Karna Suswandi turun dari ruang pemeriksaan KPK pada pukul 17.49 WIB. Dia digiring oleh sejumlah petugas KPK.

Karna Suswandi tampak telah mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol. Selain Karna, KPK turut menahan Eko Prionggo (EPJ) selaku PPK atau Kepala Bidang Binamarga PUPP Kabupaten Situbondo.

"Kepada Saudara KS maupun Saudara EPJ, mulai tanggal 21 Januari hari ini sampai tanggal 9 Februari 2025 penyidik melakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari di rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur cabang Rutan KPK," ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Karna Suswandi diduga mendapatkan "uang investasi/ijon"



Bupati Situbondo Karna Suswandi bersama PNS di Dinas PUPR Pemkab Situbondo Eko Prionggo Jati mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025). (Ist)

terkait pengaturan pemenang paket pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman (PUPP) Situbondo.

"Tersangka Karna Suswandi (KS) menerima pemberian 'uang investasi'/ijon melalui orang-orang kepercayaan sekurang-kurangnya sebesar Rp 5,5 miliar," ujarnya.

KPK sejak 2024 memulai penyidikan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Situbondo. Korupsi itu berkaitan dengan pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Pemkab Situbondo periode 2021-2024.

"Pada tanggal 6 Agustus 2024, telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021-2024," kata jubiir KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan, Rabu (28/8/2024).

Tessa mengatakan dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus tersebut, yakni Karna Suswandi dan Eko Prionggo selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(PUPR) Pemkab Situbondo.

Ia menyebutkan, Eko diduga meminta fee sebesar Rp 811 juta dalam pengaturan pemenang paket pekerjaan tersebut.

"Tersangka EPJ (Eko Prionggo Jati) menerima uang fee secara langsung dan melalui bawahannya di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo sekurang-kurangnya sebesar Rp 811.362.200," tuturnya.

Diketahui, Karna Suswandi mendapat suara terbanyak dan terpilih menjadi Bupati Situbondo sejak 2021 hingga sekarang.

Sementara, Karna harus menelan kekalahan dalam kontestasi Pilkada Situbondo 2024. Di Pilkada Situbondo, Karna yang berpasangan dengan Khoirani memperoleh 188.782 suara, kalah dari Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Ulfiah, memenangkan kontestasi dengan perolehan 202.479 suara.

Mengutip dari situs e-LHKPN KPK, Karna Suswandi diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 2.816.304.703. Laporan harta kekayaan terbaru Karna Suswandi diterbitkan pada 31 Desember 2024. (ant, din, rls/dya)

KPK Minta Sidang Praperadilan Hasto Ditunda 3 Pekan, Kenapa?

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Biro Hukum mengajukan penundaan sidang praperadilan tersangka suap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Pemohonan penundaan tersebut menjadi sidang KPK tak hadir pada sidang perdana yang digelar Selasa (21/1/2025). Sidang tersebut dijadwalkan ulang hingga 5 Februari 2025 karena ketidakhadiran KPK sebagai termohon.

"Karena masih harus menyiapkan materi sidang mulai dari ahli sampai dengan hal administratif lainnya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan resmi. Ia menyebut dalam menyiapkan materi sidang memerlukan waktu koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Sementara, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menghadapi sejumlah praperadilan dalam waktu yang bersamaan, termasuk yang diajukan

suami Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, sekaligus Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng dari PDIP, Alwin Basri.

"Selain dari Pak HK, sesuai pengetahuan saya ya, itu Pak Alwin yang perkara Semarang. Kemudian, saya agak lupa apa lagi. Yang jelas, jadi itu duluan Pak Alwin, kalau nggak salah. Ini kan rentetannya yang Semarang," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

Lantaran itu, lanjut dia, Biro Hukum KPK masih memerlukan waktu untuk menyiapkan praperadilan Hasto dan meminta PN Jaksel untuk menunda sidang pendahuluan.

"Jadi kita harus persiapan matang-matang untuk menyiapkan bukti-bukti dan yang lainnya, yang akan nanti sama-sama diadu di persidangan nanti," ujarnya.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto menunda sidang praperadilan perdana Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang seharusnya berlangsung Selasa. Djuyamto mengatakan, KPK belum



Dua advokat senior yang menjadi tim penasihat hukum Hasto, Todung Mulya Lubis dan Maqdir Ismail usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025). (Ist)

hadir dalam persidangan hari ini.

"Kami memperoleh surat permintaan penundaan sidang tertanggal 16 Januari, pasca termohon," ujar dia dalam sidang di PN Jakarta Selatan.

Dia menuturkan, termohon meminta sidang ditunda tiga pekan. Namun, hakim sudah bersikap untuk menundanya paling lama dua pekan. "Sidang perkara praperadilan nomor 5 kita tunda hari Rabu, 5 Februari 2025,"

ujar Djuyamto sembari mengetuk palu sidang.

Hasto sebelumnya mendaftarkan permohonan praperadilan di PN Jaksel pada Jumat, 10 Januari 2025. Perkara itu terdaftar dengan nomor 5/Pid.Pra/2025/PN JKTSEL. Pada 24 Desember 2024 lalu, KPK menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku. Keduanya adalah Hasto Kristiyanto dan advokat Donny Tri Istiqomah. (din, ant, rls/dya)

Soal Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi Kemendikti: Perlu Diteliti Lebih Dalam

JAKARTA - Revisi Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang menyatakan perguruan tinggi bakal dapat izin untuk usaha pertambangan mengejutkan banyak pihak.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemendikristek) Togar M Simatupang menyatakan pengelolaan tambang oleh kampus memerlukan pengkajian lebih dalam.

"Kalau kita (Kemendikristek) mewacanakannya dari pemerintah, positif saja. Tetapi harus dikaji dengan lebih dalam," ujar Togar kepada wartawan di Gedung D Kemendikristek, Selasa (21/1/2025).

Proses pengkajian pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi menurut Togar memuat berbagai aspek. Dari dampak positif dan negatif terhadap perguruan tinggi, apakah sesuai dengan visi-misi perguruan tinggi terkait, hingga sumber daya.

"Apakah dampaknya positif negatif terhadap perguruan tinggi? Bagaimana visi-misi perguruan tinggi? Sampai kepada nanti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sumber daya," jelasnya.

"Dosennya mau dikemanakan, apakah nanti akan terjadi model bisnis yang baru dan sebagainya," tambah Togar.

Togar yakin, pemerintah bisa bijaksana dalam mengambil keputusan akhir revisi RUU Minerba. Karena keputusan yang memberikan manfaat tentu akan didukung oleh pemerintah.

"Kalau nanti terjadi sesuatu yang manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya, tentu akan didukung oleh masyarakat termasuk oleh anggota dewan," ungkap Togar.

"Tapi kalau itu nanti lebih banyak mudaratnya, saya rasa pemerintah juga bijaksana dalam hal ini," pungkasnya.

Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho pun menilai poin-poin baru dalam revisi UU Minerba ini bermasalah.

"Kami menduga, Penyusunan Rancangan UU Minerba untuk memuluskan upaya mekanisme pemberian izin untuk badan usaha milik Ormas. Ditambah pula dengan Badan Usaha milik Perguruan Tinggi (PT) dan UMKM - menggunakan banyak kalimat - atau diberikan secara Prioritas," ujarnya.

Ia menilai bahwa hal ini merupakan bentuk lain dari "jor-joran" izin tambang yang



(Ilustrasi) Lahan tambang tak hanya diberikan ke ormas keagamaan, tapi ke depan perguruan tinggi juga dapat jatah pengelolaan. (Dok.ant)

membahayakan bagi keberlanjutan, baik di batu bara maupun mineral.

Selain itu, ini menunjukkan Pemerintah mengakui bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UU, sehingga perlu mengubah UU Minerba.

Dalam konteks pemberian WIUP secara prioritas kepada perguruan tinggi (PT) misalnya. Menurut Aryanto, seharusnya perguruan tinggi fokus pada penyiapan SDM, pengetahuan, dan kapasitas yang mendukung hilirisasi industri pertambangan yang mendukung percepatan transisi energi.

Dalam konteks hilirisasi, PT bisa bermain peran dalam mendukung adanya Transfer of Knowledge dari Investor, membuat lab-lab yang mendukung industri, dan menghasilkan banyak paten. "Bukan malah membuat badan usaha milik PT!" ungkap Aryanto.

Sementara, Peneliti Indonesia Parliamentary Center (IPC), Arif Adiputro menilai bahwa secara formil dalam pembentukan Undang-Undang (UU) berdasarkan Pasal 23 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) dijelaskan UU yang masuk kumulatif terbuka seharusnya mengakomodir putusan MK di luar putusan MK tidak bisa dibahas, jika mau dibahas harus ditetapkan dalam Prolegnas prioritas tahunan.

"Dalam hal ini DPR gagal memahami dalam proses pembentukan UU dan melanggar konstitusi. Selain itu, dengan disahkan UU Minerba dalam waktu singkat tanpa mempertimbangkan masukan masyarakat DPR dinilai tidak belajar dari problem sebelumnya mengenai meaning full participation atau partisipasi bermakna," ujarnya.

Padahal di UU PPP dijelaskan bahwasanya UU yang masuk kumulatif terbuka maupun yang masuk Prolegnas harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya.

Menurut dia, konsekuensi dari pengesahan UU minerba yang terburu-buru akan mengakibatkan kurangnya legitimasi dari masyarakat dan menimbulkan konflik di kemudian hari. Kemudian implementasi dari undang-undang tersebut tidak berjalan optimal.

Panggil Perwakilan Kampus

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) berencana memanggil sejumlah perwakilan perguruan tinggi pada Rabu (22/1/2025). Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan bahwa pemanggilan perwakilan pihak kampus itu untuk mendengarkan aspirasi terhadap usulan perguruan tinggi dapat konsesi tambang pada penyusunan Revisi Undang-undang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Rencananya seperti itu (memanggil pihak kampus)," katanya ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

Dia tak menjelaskan detail kampus mana saja yang diundang untuk rapat dengar pendapat. Bob berujar dengan mendengarkan aspirasi dari tiap-tiap kampus, maka penyusunan rancangan produk hukum itu bisa lebih terintegrasi dan bervariasi.

"Kami akan mulai memanggil. Intinya dalam pembahasan nanti bersama pemerintah juga akan dibahas kembali," ujarnya.

Dengan begitu, kata dia, prinsip meaningful participation public dalam penyusunan RUU Minerba ini bisa terpenuhi. Bob juga menampik jika pemanggilan pihak kampus itu berkenaan dengan kritik yang disampaikan oleh kelompok

Pasal yang Dinilai Bermasalah dalam RUU Minerba

1. Pasal 51 ayat (1) di mana Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau Perusahaan perseorangan dengan cara Lelang atau dengan cara pemberian prioritas

2. Pasal 51A ayat (1) WIUP Mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.

3. Pasal 51B ayat (1) WIUP Mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas.

4. Pasal 75 ayat (2) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

masyarakat sipil terhadap usulan masuknya perguruan tinggi ke dalam pihak yang bisa mengelola tambang.

Dalam penyusunan ke depan, kami terus menampung aspirasi. Ya sudah, kami undang semuanya untuk lebih lengkap," kata Bob.

Politikus dari Partai Gerindra ini berujar bahwa pertimbangan Baleg DPR memasukkan perguruan tinggi sebagai salah satu pihak yang bisa mengelola tambang lantaran untuk peningkatan mutu pendidikan. Adapun selain perguruan tinggi, Baleg DPR juga mengusulkan organisasi kemasyarakatan, koperasi, perusahaan perorangan, maupun badan usaha sebagai pihak yang dapat konsesi tambang.

Menurut dia, pemberian wilayah izin usaha pertambangan untuk kelompok itu agar pemanfaatan sumber daya alam bisa dilakukan secara merata oleh masyarakat luas. Pemerataan pemanfaatan kekayaan alam itu, katanya, ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

"Kami akan membuka peluang-peluang, dibandingkan adanya garapan ilegal, yang ujungnya nanti kerusakan alam," kata Bob. (wid, rls, ant/dya)

Targetkan Renovasi 88 Rumah Tak Layak Huni, Pemkot Batu Siapkan Rp 30 Juta/ Unit

BATU - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) kembali melaksanakan program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2025. Sebanyak 88 rumah telah terverifikasi untuk menerima bantuan renovasi dengan anggaran Rp 30 juta per unit.

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengharapkan program ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi tak layak.

"Jadi 88 rumah ini yang sudah terverifikasi sebagai penerima bantuan dari total 148 pengajuan yang masuk.

Tahun ini, kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 juta untuk setiap rumah yang direnovasi," ujar Aries, Selasa (21/1/2025).

Aries menambahkan, proses pengerjaan masing-masing RTLH diperkirakan memakan waktu satu hingga tiga bulan, tergantung pada tingkat kerusakan rumah.

Lebih lanjut, Aries menjelaskan program RTLH ini merupakan

komitmen Pemkot Batu dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, renovasi rumah tak hanya memperbaiki kondisi fisik hunian, tetapi juga diharapkan berdampak positif pada produktivitas dan kualitas hidup penerima manfaat.

"Sekarang bayangkan, kalau rumah sudah lebih layak dan sehat, masyarakat akan dapat lebih fokus pada pekerjaan dan aktivitas produktif lainnya. Ini tentu menjadi langkah penting dalam meningkatkan taraf hidup mereka," tambah pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur ini.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Batu memiliki hunian yang layak sebagai bagian dari upaya bersama dalam menciptakan kota yang inklusif dan berdaya saing," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu, Bangun Yulianto, mengungkapkan dana bantuan sebesar Rp 30 juta tersebut akan langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat. Namun, Bangun menekankan proses renovasi

tersebut tetap diawasi secara ketat untuk memastikan pekerjaan sesuai standar.

Bangun juga menambahkan, tingkat kerusakan rumah yang menjadi prioritas renovasi dalam program RTLH meliputi kerusakan pada bagian atap yang bocor atau rapuh, dinding yang retak atau tidak kokoh, lantai yang masih berupa tanah, serta fasilitas sanitasi yang tidak memadai.

Selain itu, rumah yang dinilai berpotensi membahayakan penghuninya, seperti konstruksi yang hampir roboh atau tidak layak secara struktural, juga masuk dalam daftar prioritas perbaikan.

"Renovasi difokuskan pada bagian-bagian rumah yang mendesak. Terlebih jika kondisi bangunan membahayakan penghuni," ujar Bangun.



Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai didampingi Kepala Disperkim Kota Batu, Bangun Yulianto, meninjau salah satu penerima manfaat bedah Rumah Tak Layak Huni di Bumijaji. (dok. Prokopim Kota Batu)

Terpisah, salah satu penerima manfaat, Sunanik, warga Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumijaji, mengaku sangat terbantu dengan program ini. Rumah yang sebelumnya memiliki atap rapuh dan lantai tanah kini mendapatkan perhatian untuk direnovasi menjadi lebih layak. (Santi/Dya)

Revitalisasi Kayutangan Heritage Masuk Usulan Program di 2026



Tampak tanda berupa tulisan Kayutangan Heritage di perbatasan koridor zona 1 dan 2, Selasa (21/1/2025). (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah menggodok rencana revitalisasi kawasan Kayutangan Heritage. Salah satu ikon wisata Kota Malang ini diusulkan masuk dalam program pembangunan di tahun 2026.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, mengatakan konsep revitalisasi tersebut bertujuan menciptakan wajah baru Kayutangan yang tetap mempertahankan nilai sejarahnya, sekaligus meningkatkan daya tarik wisata secara lebih menyeluruh di semua zona

Kayutangan.

"Saya sudah meminta agar feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) kawasan Kayutangan Heritage dimasukkan dalam usulan program pembangunan tahun 2026. Nantinya, saya ingin ada intervensi dari OPD terkait agar konsep yang sudah disusun bisa segera ditindaklanjuti," ujar Iwan, Selasa (21/1/2025).

Iwan menambahkan, rencana revitalisasi ini didorong oleh tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan terhadap kawasan Kayutangan. "Sayang sekali jika potensi ini tidak diantisipasi dengan baik oleh Pemda," tambah Iwan.

Terlebih, sambung Iwan, Pemkot Malang juga telah menerima dukungan berupa konsep dasar pre-desain koridor Kayutangan, yang merupakan bantuan corporate social responsibility (CSR) dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) wilayah Malang.

Iwan menjelaskan, salah satu fokus dalam rencana revitalisasi ini yaitu perlunya penataan yang merata di seluruh zona kawasan Kayutangan. Diketahui, kawasan koridor Kayutangan Heritage dibagi menjadi 3 zonasi, yakni zona I mulai dari simpang PLN hingga simpang Rajabaly. Zona II dari Rajabaly hingga Jalan Jenderal Basuki Rahmat Gang IV, dan zona III dari Jalan Jenderal Basuki Rahmat Gang IV hingga Patalung Chairil Anwar dan Sarinah.

Menurutnya, selama ini pembangunan dan ramainya koridor Kayutangan hanya terfokus di zona selatan atau zona III, sepanjang 800 meter. Sementara 2 zona lainnya dirasa masih belum tersentuh.

"Kayutangan itu tidak hanya 800 meter saja, tapi sampai yang utara juga. Itu konsep paling utama. Jadi jangan hanya berhenti penataannya atau (fokus) wisatanya hanya di 800 meter yang sekarang ini," jelasnya.

Lebih lanjut, untuk mendukung rencana ini, Iwan mengaku telah melibatkan berbagai pihak, termasuk IAI Malang, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Kayutangan, serta kepala perangkat daerah terkait.

"Sebelum masa jabatan saya

selesai, setidaknya sudah ada konsep yang disusun oleh orang Malang, dari masukan masyarakat Malang, yang nantinya saya serahkan kepada wali kota terpilih untuk dieksekusi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua IAI Wilayah Malang, Armada Indra Permana, menjelaskan konsep wajah baru Kayutangan akan menghadirkan penataan yang lebih tertib, termasuk sterilnya parkir di tepi jalan. Terlebih menurutnya, Pemkot Malang juga tengah berproses untuk menyediakan kantong parkir terpusat.

Indra menyebutkan, beberapa elemen yang dinilai tidak memiliki kaitan sejarah, seperti lori, box telepon, dan lampu hias tertentu, diusulkan untuk dibongkar atau diganti. JPO yang dinilai menghalangi visual kawasan juga masuk dalam daftar yang akan dievaluasi.

Menurutnya, revitalisasi ini akan memberikan sentuhan baru yang tetap selaras dengan nilai sejarah Kayutangan. "Yang jelas kami ingin Kayutangan lebih baik lagi dan tidak lepas dari sejarahnya.

Ada banyak penambahan yang akan menjadikan ikon baru Kota Malang ini memiliki wajah baru. Sehingga pengunjung bisa rata di semua zona," tutupnya. (Santi/Dya)

Yoon Bela Diri di Sidang Pemakzulan soal Darurat Militer di Korsel



Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan parlemen, Yoon Suk-yeol, menjalani sidang perdana di Mahkamah Konstitusi, Seoul, Selasa (21/1/2025). Foto: KIM HONG-JI/AFP

FAKTA-FAKTA PEMAKZULAN PRFESIDEN YOON SUK YEOL

- **Darurat Militer**
Pemakzulan Yoon berawal dari penerapan status darurat militer yang dia umumkan pada 3 Desember lalu.
- **Dituduh Memberontakan**
Yoon dituduh memberontak oleh Partai Demokrat dan lima partai oposisi kecil lainnya.
- **Putusan Pemakzulan**
Proses pemakzulan berlangsung di parlemen dan akan bergulir ke Mahkamah Konstitusi.
- **Presiden Sementara**
Han Duck Soo mengambil alih tugas presiden setelah Majelis Nasional memakzulkan Yoon.
- **Presiden Ke-3 Korsel**
Jika keputusan diterima, Yoon jadi presiden ke-3 yang digulingkan parlemen Majelis Nasional.
- **Yoon Melawan Pemakzulan**
Yoon komentari pemakzulan dan mengulangi tekadnya untuk melawan sampai titik terakhir.

SEOUL - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan akhirnya tampil perdana di depan publik pada Selasa (21/1/2025) saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Dia membantah telah memerintahkan komandan militer untuk menyeret keluar anggota parlemen selama upayanya yang singkat untuk memberlakukan darurat militer.

Menjelang awal sidang, Yoon mengatakan bahwa dia bekerja di layanan publik dengan "komitmen kuat terhadap demokrasi bebas", saat diundang oleh penjabat kepala hakim, Moon Hyung-bae, untuk berbicara.

Mengenakan setelan jas berwarna biru tua dengan dasi merah anggur, Yoon, seorang jaksa karier sebelum terpilih sebagai presiden pada tahun 2022, berjanji untuk menjawab pertanyaan apa pun yang mungkin diajukan pengadilan.

Yoon telah dipenjarakan sejak minggu lalu berdasarkan tuduhan pidana terpisah yakni memimpin pemberontakan melalui upayanya memberlakukan darurat militer pada awal Desember, sebuah tindakan yang mengejutkan negara dan dibatalkan dalam beberapa jam oleh parlemen.

Yoon mengatakan dalam sidang tersebut bahwa pasukan khusus yang dikirim ke parlemen pada tanggal 3 Desember tidak ada di sana untuk melumpuhkan badan legislatif atau mencegahnya memblokir darurat militernya karena ia tahu tindakan seperti itu akan menyebabkan krisis yang tidak dapat dipertahankan.

"Di negara ini, parlemen dan media berita jauh lebih berkuasa daripada presiden, dalam posisi yang jauh lebih unggul," ungkapnya kepada pengadilan.

Pengacaranya mengemukakan argumen untuk membela pernyataan darurat militer Yoon, dengan mengatakan bahwa pernyataan itu dimaksudkan untuk membunyikan peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Demokrat oposisi.

Mereka berpendapat tindakan oposisi telah melumpuhkan pemerintah dan mendorong tatanan demokrasi dan konstitusional negara itu ke ambang kehancuran.

"Keputusan itu dimaksudkan hanya untuk menetapkan format darurat militer dan tidak pernah dimaksudkan untuk dilaksanakan, juga tidak mungkin dilaksanakan karena potensi konflik dengan undang-undang tingkat tinggi," kata pengacara Cha Gi-hwan kepada pengadilan.

Cha juga membantah

kesaksian komandan militer yang terlibat dalam deklarasi darurat militer yang mengatakan Yoon dan para pembantu utamanya memerintahkan penangkapan sejumlah anggota parlemen yang berselisih secara politik dengan presiden.

Partai Demokrat oposisi, yang bergabung dengan partai-partai minoritas dan juga 12 anggota Partai Kekuatan Rakyat Yoon, memberikan suara dengan mayoritas dua pertiga untuk memakzulkan Yoon pada tanggal 14 Desember.

Suasana Sidang

Mahkamah Konstitusi memulai persidangan pada 27 Desember untuk meninjau usulan pemakzulan yang menuduh Yoon melanggar tugas konstitusionalnya dengan memberlakukan darurat militer tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Tim hukum DPR menghadirkan keterangan saksi dari panglima militer serta rekaman video yang memperlihatkan helikopter militer mendarat di halaman DPR dengan pasukan khusus menerobos masuk ke gedung utama, serta pasukan bergerak menuju Komisi Pemilihan Umum Nasional.

Salah satu pengacara juga mengkritik klaim yang tidak terbukti mengenai adanya pelanggaran di komisi pemilu, yang dikutip Yoon sebagai faktor pembenaran darurat militer.

"Dalam kekacauan nasional Korea Selatan saat ini, teori konspirasi kecurangan pemilu dapat menghancurkan komunitas kami sendiri," kata pengacara tersebut.

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah akan memberhentikan Yoon dari jabatannya secara permanen atau mengembalikannya.

Yoon diantar ke tempat sidang dari Pusat Penahanan Seoul, tempat ia ditahan, dengan kendaraan dinas pemasyarakatan yang dikawal oleh iring-iringan mobil Dinas Keamanan Presiden.

Dia diizinkan untuk berganti dari seragam penjara berwarna khaki yang saat ini harus dikenakannya.

Keputusan Yoon untuk menghadiri sidang pemakzulan kontras dengan penolakan kerasnya terhadap proses pidana terhadap dirinya di mana ia menolak untuk menjawab panggilan penyidik atau menghadiri sesi interogasi.

Tim hukum Yoon membantah bahwa ia mendalangi pemberontakan, sebuah kejahatan di Korea Selatan yang dapat dihukum dengan penjara seumur hidup atau bahkan secara teknis dengan hukuman mati.

Keamanan ditingkatkan di Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa (21/1/2025), setelah gerombolan pendukung Yoon yang marah mengamuk di pengadilan distrik yang mengeluarkan surat perintah untuk memperpanjang penahanannya pada hari Minggu pagi. (reuters,ist/nei)



Makanan yang Tak Aman Dipanaskan dengan Microwave

MEMANASKAN sisa makanan semalam dengan microwave biasanya dilakukan untuk disantap kembali, namun para ahli mengatakan hal itu bukan langkah terbaik.

Ditulis laman New York Post, Sabtu (18/1/2025), oven microwave dapat memasak makanan secara tidak merata dan meninggalkan "titik dingin", sehingga bakteri berbahaya dapat bertahan hidup selama proses pemanasan ulang, menurut Universitas Negeri Michigan.

Selain itu, makanan yang dipanaskan ulang dengan microwave tidak selalu terasa enak. Sisa makanan bisa menjadi kering atau terlalu matang

Beberapa diantaranya makanan yang tidak baik dipanaskan kembali menggunakan microwave.

1. Telur rebus

Dikenal sebagai sumber protein yang kaya, telur rebus adalah camilan cerdas dan mudah dibawa.

Namun para ahli makanan menyarankan untuk memakannya dalam keadaan dingin daripada menggunakan microwave untuk menghilangkan rasa dinginnya.

"Jangan sekali-kali memanaskan telur rebus di microwave. Melakukan hal itu menyebabkan uap dan tekanan terbentuk di putih telur, dan dapat menyebabkan letusan saat telur dipotong," kata seorang ahli diet terdaftar di Nutley, New Jersey Amanda Holtzer.

"Letusan ini dapat terjadi di microwave, di piring Anda atau, yang lebih menakutkan, di mulut Anda saat Anda menggigit telur," kata Holtzer kepada Fox News Digital.

2. Makanan kaya vitamin c

Karena vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air yang sangat sensitif terhadap panas, hindari penggunaan microwave untuk makanan yang kaya akan vitamin ini, kata Holtzer.

"Saat terkena panas, vitamin C akan rusak dan hancur," ungkapnya. Makanan yang kaya akan vitamin C antara lain brokoli, paprika, beri, dan sayuran berdaun hijau.

Untuk menjaga integritas vitamin C dalam makanan ini, Holtzer menyarankan untuk mengonsumsinya mentah sesering mungkin.

3. Ayam

Dari sudut pandang keamanan pangan, memanaskan kembali ayam biasanya sangat aman. Namun, dari sudut pandang kontrol kualitas, ia akan merekomendasikan agar ayam tidak dipanaskan kembali.

"Jika ayam disimpan di lemari es setelah dimasak, lemak dalam daging dapat teroksidasi, yang dapat mengubah struktur kimia ayam dan karenanya rasanya," kata Holtzer.

"Lalu, ketika dipanaskan kembali, semua cairan yang ada di dalam ayam akan menguap, sehingga menghasilkan ayam dengan rasa dan tekstur yang tidak enak."

Sebaliknya, dengan sisa ayam, Holtzer menyarankan untuk mengolahnya kembali menjadi resep yang tidak memerlukan pemanasan ulang, seperti sandwich atau salad ayam wrap.

4. Makanan laut

Memanaskan kembali makanan laut bukanlah hal yang baik, kata

Holtzer. Salah satunya ikan.

Panas yang tinggi dari microwave dapat menyebabkan kadar air dalam ikan menguap dengan cepat, yang dapat menyebabkan teksturnya menjadi sangat kering dan kenyal.

Dari sudut pandang kuliner, Jim Nuetzi, kepala koki perusahaan untuk Valor Hospitality di Atlanta, Georgia, setuju bahwa memasukkan makanan laut ke dalam microwave tidak akan memberikan hasil terbaik.

"Makanan laut sama sekali tidak cocok untuk saya. Sangat sulit untuk memanaskan kembali makanan laut tanpa mengalami beberapa efek samping, tetapi memanaskan kembali makanan laut dalam microwave khususnya akan membuatnya kering," kata Nuetzi.

5. Daging sapi

Jika Anda memiliki sisa steak dari makan malam di restoran bagus dan ingin memanaskannya kembali dalam microwave keesokan harinya, Anda tidak akan menikmati pengalaman gourmet yang sama pada hari kedua atau ketiga, kata para ahli.

"Memanaskan kembali daging steak dapat menyebabkannya kehilangan tekstur dan rasa empuknya karena panas tambahan cenderung mengeringkan daging dan membuatnya alot," kata Nuetzi.

"Selain itu, pemanasan ulang sering kali menghasilkan suhu yang tidak merata. Beberapa bagian daging steak mungkin menjadi terlalu matang, sementara bagian lainnya tetap dingin," tambahnya.

6. Bayam

Bayam mengandung nitrat yang

dapat berubah menjadi senyawa beracun jika dipanaskan berulang kali. Sebaiknya, konsumsi bayam segar atau rebus sebentar sebelum disajikan.

7. Jamur

Jamur memiliki kandungan protein yang tinggi dan struktur yang lembut. Jika dipanaskan berlebihan, tekstur jamur bisa menjadi kenyal dan kurang enak. Disarankan untuk memanaskan jamur dengan suhu tinggi untuk menghindari tumbuhnya bakteri.

8. Kentang

Kentang goreng yang sudah digoreng sekali dan disimpan dalam suhu ruangan terlalu lama dapat menjadi lembek dan berpotensi berkembang biak bakteri. Jika ingin memanaskan kembali kentang goreng, sebaiknya lakukan sekali dengan suhu yang mencukupi untuk menghangatkannya.

9. Nasi

Memanaskan nasi secara berulang kali dapat memicu pertumbuhan bakteri *Bacillus cereus*, yaitu jenis bakteri yang secara alami dapat ditemukan pada nasi yang sudah dimasak dan dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang.

Bakteri ini mampu menghasilkan racun yang tahan terhadap panas, sehingga meskipun nasi dipanaskan kembali, racun tersebut tetap dapat menyebabkan keracunan makanan, dengan gejala seperti mual, muntah, atau diare.

Untuk menghindari risiko tersebut, sangat disarankan agar nasi hanya dipanaskan satu kali saja. (nei,ist/dya)



Daging Sapi



Nasi Putih



Sayur Bayam



Daging Ayam



Kentang Goreng

Instagram

Rilis Edits Rival Capcut

KEPALA Instagram Adam Mosseri melalui akun threads-nya @mosseri mengumumkan layanan terbaru Instagram bernama Edits yang bakal menjadi rival dari CapCut sebagai aplikasi pengeditan video.

"Hari ini kami mengumumkan Edits. Sebuah aplikasi baru untuk membuat video di ponsel pintar kalian," kata Mosseri dalam video yang dibagikan di akun Threads miliknya, Minggu (19/1/2025) waktu setempat.

Menurutnya, Edits tidak hanya berguna untuk memotong, menyambungkan, dan menghasilkan video

seperti aplikasi pengeditan lainnya tapi juga akan dilengkapi alat kreatif.

Edits diklaim akan menghadirkan tab khusus untuk inspirasi, tab lain untuk melacak ide-ide awal, serta akses ke kamera dengan video berkualitas lebih tinggi. Mosseri memastikan semua alat penyuntingan yang dicari-cari oleh kreator konten akan berada semuanya di dalam Edits.

Dalam hal pengeditan, Edits dijanjikan juga bisa mengelola video green screen dan juga video yang dapat ditumpuk (video overlays). Dua fitur itu juga tersedia pada aplikasi pengeditan TikTok yang menjadi saingan Instagram.

Apabila video yang dihasilkan di Edits dibagikan di Instagram, Mosseri menjanjikan akan ada rangkuman data yang berguna untuk kreator melihat keterkaitan penonton dengan video tersebut.

Sebuah fitur khusus bernama "Live Insights dashboard" nantinya akan tersedia untuk dapat memetakan ketertarikan pengguna dan non-pengguna terhadap konten tersebut. Akan ada juga metrik untuk melihat seberapa sering pengguna melewati jenis konten tertentu.

Saat ini Edits belum tersedia secara luas dan baru tersedia dalam sistem pre-order yang turut dibagikan Mosseri di Threads tak lama setelah mengumumkan kehadiran Edits.

Diklaim akan Lebih Baik dari Capcut

Bukan hanya itu, ada pula dashboard insight atau wawasan yang bisa dipantau secara live, terkait dengan engagement dari follower

atau non-follower, hingga metrik tentang seberapa seringnya pengguna men-skip sesuatu.

Edits juga akan menghadirkan tool editing yang mengizinkan pengguna memakai green screen hingga video overlay. Keduanya merupakan fitur yang banyak dipakai di video TikTok.

Menurut Mosseri, aplikasi ini telah dikembangkan selama beberapa bulan dan sangat berbeda dengan Capcut. "Edits akan memiliki alat kreatif yang lebih luas," katanya.

Tampilan Baru Instagram

Sementara itu, tampilan Instagram berubah. Perubahan tampilan ini terjadi pada laman profil, di mana grid foto semula berbentuk persegi. Namun dengan perubahan ini, tampilan grid akan berbentuk persegi panjang.

Perubahan ini belum digulirkan ke semua pengguna Instagram, namun sebagian akun sudah menyebutkan adanya perbedaan tampilan grid di profil mereka. Sejumlah pengguna pun mengunggah hasil screenshot tentang perubahan tampilan grid ini.

Dalam Instagram Story-nya, sebagaimana dikutip The Verge, Senin (20/1/2025), Head of Instagram Adam Mosseri, mengatakan, Instagram telah mulai menggulirkan perubahan tampilan ini selama akhir pekan ini.

"Aku paham sebagian dari kalian begitu menyukai tampilan persegi, dan foto dalam bentuk persegi terasa seperti warisan Instagram. Namun kini, kebanyakan konten yang diunggah, baik itu foto maupun video menggunakan orientasi vertikal, jadi sungguh disayangkan jika memangkasnya secara berlebihan," kata Adam Mosseri. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN | TRENGGALEK: TINA W | NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | DKI JAKARTA: FUAD HASSAN | LOMBOK BARAT: MUHAYYAN | PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI**

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Varietas Durian Lokal Unik Gundul hingga Merah

DURIAN merupakan salah satu buah ikonik dan buah tropis yang dikenal sebagai "raja buah" karena aromanya yang khas dan dagingnya yang lembut serta kaya rasa yang menjadi komoditas unggulan di Indonesia. Ketika musimnya tiba, stok durian di berbagai daerah pun langsung melimpah-ruah.

Indonesia sendiri termasuk ke dalam negara-negara penghasil durian terbanyak di dunia. Dalam setahun saja, durian di Indonesia bisa mencapai puncak panennya beberapa kali.

Varietas durian lokal juga begitu beragam. Hampir masing-masing daerah penghasil durian di Tanah Air, memiliki varietas khasnya masing-masing. Menurut jurnal Herbarium Bogoriense, di dunia terdapat 29 spesies durian. Dari total spesies durian tersebut, Indonesia memiliki kurang lebih 20 di antaranya.

Bukan cuma itu, ada juga, lho varietas durian unik dan langka yang hanya ada di Indonesia. Nah, apa saja varietas durian lokal unik? Yuk, simak rangkuman kumparanFOOD di bawah ini.

1. Durian pelangi

Mengutip Cybext Kementerian Pertanian, durian pelangi merupakan varietas asal Manokwari. Sesuai

namanya, durian ini memiliki daging buah berwarna-warni bak pelangi. Warnanya bergradasi mulai dari putih, merah, merah muda, hingga kuning.

2. Durian merah

Mengutip Indonesia.go.id, Banyuwangi memiliki varietas durian merah yang tak kalah unik. Disebut durian merah karena daging buahnya berwarna merah, namun kulitnya tetap berwarna kuning kehijauan seperti pada umumnya.

Selain di Banyuwangi, buah durian merah juga bisa ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Di sana durian ini disebut dengan nama tabelak.

3. Durian kembang

Salah satu durian langka dan unik bisa kamu temukan ketika mengunjungi daerah Lumajang, Jawa Timur. Mengutip BSIP Jawa Timur, di kabupaten ini kamu bisa menemukan durian kembang.

Dinamakan durian kembang karena saat dibelah akan ada bunga pada bagian tengahnya. Durian ini memiliki rasa manis legit dengan sentuhan pahit.

4. Lahung

Durian mungil satu ini juga sering disebut sebagai durian merah. Terbalik dengan durian merah, lahung justru memiliki kulit luar berwarna merah dengan daging buah kuning

oranye di dalamnya. Buah asal Kalimantan ini sering juga disebut durian hutan.

5. Durian gundul

Nah, yang paling unik adalah durian gundul. Sesuai namanya, durian ini tak berduri. Kulitnya "gundul" mulus dengan warna cokelat khas.

Menegutip Antara, buah ini sejatinya berasal dari Lombok dan memiliki ketebalan daging sekitar setengah sentimeter dengan rasa khas manis nan legit.

6. Buah lai

Dari Kalimantan ada durian unik yang daging buahnya berwarna oranye terang. Nama populernya juga tidak membawa unsur nama durian, tetapi buah lai. Meski begitu, buah eksotis ini juga kerap disebut durian tinggang, durian pulu, atau sekawi.

Buah lai tergolong sulit didapat di Jakarta karena memang pasokannya dari Kalimantan sedikit dan tidak tentu. Namun kalau mau berburu, bisa beli buah lai di situs belanja online dengan harga Rp 30 ribuan per butir.

Tampilan buah lai sekilas memang mirip durian, namun ukurannya lebih kecil dan durinya tidak tajam. Aromanya harum, namun tak menyengat seperti durian kebanyakan. Daging buahnya berwarna oranye cerah dengan tekstur tebal. Rasanya

manis enak dengan tekstur lebih lembut dan creamy dibanding durian pada umumnya.

7. Durian tanpa biji

Selain durian merah, dari Banyuwangi ada durian Si Boneng yang jadi pembicaraan pada tahun 2019. Durian ini istimewa karena tidak punya biji.

Varietas durian non biji ini dimiliki oleh Slamet Hariadi atau sering disebut dengan Pak Boneng. Nama Boneng inilah yang kemudian diambil sebagai nama durian.

Rasa durian ini legit, pahit, dan manis. Ukuran buahnya lumayan besar dengan daging yang lebih tebal.

Mengapa Durian Indonesia Begitu Beragam?

Keberagaman varietas durian di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

Kondisi geografis:

Setiap daerah memiliki kondisi tanah dan iklim yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan varietas durian dengan karakteristik yang unik.

Seleksi alam:

Selama bertahun-tahun, terjadi seleksi alam yang membuat durian beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga muncul berbagai varietas baru.

Upaya budidaya:

Petani durian secara turun temurun melakukan upaya pembudidayaan untuk menghasilkan varietas durian dengan kualitas yang lebih baik. (nei,ist/dya)

Tanpa Biji



Merah



Kembang



Pelangi



Lahung



Gundul



Lai



Titah Prabowo: ... (dari Hal 1)

PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025) siang.

Berdasarkan pantauan, pada pukul 14.02 Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjadi yang pertama hadir.

Tak lama berselang hadir Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menarik pemanggilan ini dilakukan usai Kepala Negara mengurangi anggaran untuk infrastruktur termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang disalurkan lewat APBN. Pemotongan terjadi saat Badan Gizi Nasional (BGN) meminta tambahan dana untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp100 triliun.

Usai rapat terbatas, Kepala OIKN Basuki mengungkapkan permintaan Prabowo untuk mengkaji ulang desain IKN. "Jadi targetnya, 2028 ini [IKN] agar bisa ditetapkan sebagai ibu kota politik Indonesia," kata Basuki.

Basuki menjelaskan kajian ulang akan dilakukan untuk desain yang sudah pernah ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pengkajian ulang dilakukan usai Prabowo menetapkan IKN akan menjadi ibu kota politik.

"Untuk yudikatif dan legislatif dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR basic design-nya, beliau minta di-review lagi," kata Basuki pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta.

Basuki menyanggupi perintah itu. OIKN bakal berkomunikasi dengan Kementerian PU untuk mengkaji ulang desain Nusantara. Mereka akan membentuk tim khusus review desain IKN. Tim itu bakal mendapat perintah langsung dari Prabowo.

"Tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang kedepannya," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut penyesuaian desain berkaitan dengan anggaran. Prabowo menetapkan anggaran pembangunan IKN dalam lima tahun ke depan Rp48,8 triliun.

"Ibu kota politik, artinya kalau saat ini kita masih fokus menuntaskan pembangunan berbagai fasilitas untuk pemerintahan eksekutif, tentu belum lengkap karena syarat pemerintahan itu harus hadir pula lembaga legislatif. Kita berbicara DPR RI, DPD RI, tentu



Keadaan tanah IKN diambil dari satelit NASA 2022 (kiri) dan 2024 (kanan). (Earth Observatory NASA)

juga MPR RI," ujarnya.

Sedangkan untuk lembaga yudikatif, Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan pembangunan bakal dikejar sehingga setiap bagian dari trias politia tak hanya menjadi berupa simbol, tetapi menjadi bangunan yang nyata.

"Kita akan lakukan review kembali, ada penyesuaian di sana-sini secara teknis. Pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan," ujar AHY.

Menurutnya, dengan fokus dalam menyiapkan bangunan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka Indonesia bakal memiliki kelengkapan utuh dalam mewujudkan pemerintahan di sebuah negara yang demokratis.

"Harapan Bapak Presiden adalah ya fokus dulu di sana, sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi, maka sebenarnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis. Saya persilakan kepada investor," pungkas AHY.

Dikucuri Dana Rp 48,8 T

Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran untuk pembangunan tahap dua di IKN yaitu kompleks legislatif seperti Gedung DPR, yudikatif seperti Gedung Mahkamah Agung, dan komponen pendukungnya senilai Rp 48,8 triliun. Anggaran tersebut akan dipakai mulai 2025 hingga 2029 yang sumbernya dari APBN.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan dana Rp 48,8 triliun itu juga akan dipakai untuk memelihara bangunan yang sudah ada di IKN yaitu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga apartemen ASN yang sudah dibangun lebih dulu oleh Kementerian PU.

"Jadi Kementerian PU menyerahkan ke kami untuk dikelola dan dananya dari APBN. Dana Rp 48,8 T tadi Pak presiden sudah setuju untuk dialokasikan ke OIKN," katanya.

Saat ini dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ada di OIKN hanya ada Rp 6,3 triliun. Pak Bas mengaku butuh tambahan Rp 8,1 triliun tahun ini membangun proyek IKN tahap dua, sehingga total

dana yang dibutuhkan setahun Rp 15 triliun.

"Jadi saya kira cukup (Rp 48,8 triliun) ini untuk kami kerjakan 2-3 tahun ke depan," lanjutnya.

Target itu dikejar karena Prabowo ingin IKN jadi ibu kota politik Indonesia mulai 2028.

Selain dari APBN, pembangunan IKN tahap dua ini juga akan dibiayai oleh Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,239 triliun. Dana itu digunakan untuk membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak yang saat ini dalam proses feasibility study (FS) atau studi kelayakan.

Selanjutnya, ada juga 6 KPBU yang membangun jalan hingga terowongan (utility tunnel) di KIPP IKN. Selain itu ada juga KPBU yang bangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 50 MW yang sudah diresmikan presiden.

Pak Bas juga melaporkan ada groundbreaking ke-9 untuk pembangunan hotel, ritel, hingga perkantoran dengan nilai investasi Rp 6,49 triliun yang digarap swasta murni.

"Kami jg mendapatkan masukan dari Pak Ara (Maruarar Sirait) untuk bisa mengoptimalkan perusahaan swasta yang sudah groundbreaking tidak hanya asal groundbreaking, tapi agar ditender lagi dengan kegiatan pembangunan," jelasnya.

Dikatakan, pembangunan IKN sudah menelan anggaran Rp89 triliun anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). Menurutnya, uang itu dipakai untuk pembangunan IKN tahap pertama.

"Kami laporkan saat tahap awal 2022-2024 APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun," kata Basuki.

Basuki menjelaskan uang itu dipakai untuk membangun jalan tol menuju IKN, 47 menara hunian, saluran air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, dan kantor pemerintahan.

Selain itu, anggaran tersebut juga dipakai untuk membangun sarana peribadatan, mulai dari masjid, gereja, hingga basilika. Proyek-proyek itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

Basuki melaporkan ada duit Rp58,41 triliun di luar kas negara yang juga dipakai untuk pembangunan IKN. Uang itu berasal dari investasi sejumlah perusahaan swasta.

"Ada juga investasi swasta yang sudah groundbreaking sampai September lalu Rp58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai," ujarnya.

Banyak Groundbreaking Saja

Terpisah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan rencana pemerintah meninjau ulang kinerja investor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini menyusul temuan lambatnya proses pembangunan proyek swasta di sana.

Pria yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, saat ini banyak groundbreaking proyek sudah dilakukan di IKN, namun proyek yang diteruskan pembangunannya sedikit. Oleh karena itu pemerintah akan menanyakan komitmen swasta yang berinvestasi di IKN.

"Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, direview yang sudah groundbreaking," katanya usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

"Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," tambah dia.

Menurutnya Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan agar swasta harus diutamakan untuk membangun IKN. Dengan catatan harus ada deadline atau tenggat waktu yang harus dipenuhi para investor demi menggebut pembangunan di IKN.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun tapi ditanya saja satu-satu direview supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama yang serius," imbuhnya.

Jika tidak menyanggupi maka proyek tersebut akan diberikan ke investor lain yang mumpuni. Ara menilai hal itu diperlukan sesuai arahan Prabowo.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau nggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau nggak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadlinenya," tutupnya. (din, rls, ant, kum, ist/dya)

Usai Dilantik Trump Keluarkan AS dari WHO : Mereka Menipu Kita

WASHINGTON-Tak lama setelah dilantik jadi Presiden ke-47 Amerika Serikat, Donald Trump langsung mengambil sejumlah langkah mengejutkan. Salah satunya perintah eksekutif yang memulai proses penarikan Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Dilansir The New York Times, Selasa (21/1/2025) keputusan ini, dikeluarkan sekitar 8 jam setelah dia dilantik, Senin (20/1/2025) waktu setempat. Hal inipun telah menimbulkan kekhawatiran luas tentang masa depan kepemimpinan kesehatan global AS dan kemampuan dunia dalam menangani pandemi di masa depan.

"(Badan) Kesehatan Dunia menipu kita," katanya, dikutip dari kantor berita AFP.

Amerika Serikat adalah donatur terbesar bagi organisasi yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss, tersebut. Dukungan finansial AS sangat penting bagi operasional WHO. Jika Amerika keluar dari WHO, akan memicu restrukturisasi besar-besaran lembaga itu dan dapat mengganggu rencana-rencana kesehatan global.

Ini adalah kali kedua Trump berupaya membawa AS keluar dari WHO. Saat masa jabatan pertamanya, Trump sebagai presiden ke-45 AS menuduh WHO dipengaruhi China selama awal pandemi.

Namun, upaya Trump dibatalkan oleh Joe Biden setelah politisi Demokrat itu menang pemilihan presiden atau pilpres AS 2020.

Kemudian kali ini, Trump menekan perintah eksekutif yang memerintahkan badan-badan terkait menghentikan sementara transfer dana, dukungan, atau sumber daya Pemerintah AS ke WHO.

Kabinet Trump juga mengumumkan rencana meninjau dan membatalkan Strategi Keamanan Kesehatan Global AS 2024, yang dirancang Biden untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggapi ancaman penyakit menular.

AS keluar dari WHO saat kekhawatiran dunia meningkat mengenai pandemi flu burung (H5N1). Puluhan orang terinfeksi dan satu pasien meninggal di Amerika Serikat. Negara-negara anggota WHO sejak akhir 2021 merundingkan perjanjian pertama di dunia tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggapan pandemi. Dengan keluarnya AS, negosiasi akan dilanjutkan tanpa partisipasi Washington.



Hari pertama bekerja Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menarik AS dari keanggotaan World Health Organization/WHO pada Senin (20/1/2025) waktu setempat. (Reuters)

Adapun menurut ketentuan yang disepakati saat pendirian WHO, AS harus memberikan pemberitahuan satu tahun dan melunasi kewajiban keuangannya kepada organisasi tersebut untuk tahun fiskal berjalan sebelum penarikan diri dapat efektif.

Proses ini diperkirakan akan memakan waktu, dan banyak pihak berharap ada peluang untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini.

China Buka Suara

Jucu bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun buka suara terkait gaduh penarikan diri Amerika Serikat dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Salah satu alasan di baliknya adalah tuduhan posisi WHO yang lebih banyak mendukung China.

Terutama dalam kasus penanganan pandemi COVID-19. WHO dinilai lebih banyak memihak China, dan lambat dalam menanggapi pandemi.

Guo mengaku prihatin dengan keputusan Trump. Guo menyebut seluruh negara perlu sama-sama membantu permasalahan kesehatan dunia.

Salah satu yang disorotinya adalah adanya perubahan iklim yang mengancam umat manusia. China disebutnya akan terus bekerja sama dengan WHO.

Menurutnya, WHO memainkan peran sentral dan koordinasi yang baik dalam tata kelola kesehatan global.

"Peran WHO harus diperkuat, bukan dilemahkan," sebutnya.

"China akan terus mendukung WHO dalam memenuhi tanggung jawabnya, memperdalam kerja sama kesehatan masyarakat internasional, meningkatkan tata kelola kesehatan global, dan mempromosikan

pembangunan komunitas kesehatan bersama bagi umat manusia," lanjut dia.

Terpisah, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyesalkan keputusan Presiden Donald Trump yang berencana menarik diri dari organisasi tersebut. Keputusan itu disampaikan WHO dalam pernyataan resminya.

"WHO memainkan peran penting dalam melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dunia, termasuk warga Amerika, dengan menangani akar penyebab penyakit, membangun sistem kesehatan yang lebih kuat, dan mendeteksi, mencegah, serta menanggapi keadaan darurat kesehatan, termasuk wabah penyakit, yang sering kali terjadi di tempat-tempat berbahaya yang tidak dapat dijangkau orang lain," tulis WHO dikutip Selasa (21/1/2025).

WHO menyebut Amerika Serikat merupakan anggota pendiri organisasi tersebut di tahun 1948 dan telah berpartisipasi dalam membentuk dan mengatur pekerjaan WHO sejak saat itu, bersama dengan 193 Negara Anggota lainnya, termasuk melalui partisipasi aktifnya dalam Majelis Kesehatan Dunia dan Dewan Eksekutif.

Selama lebih dari tujuh dekade, WHO dan AS telah menyelamatkan banyak nyawa dan melindungi warga Amerika dan semua orang dari ancaman kesehatan.

"Bersama-sama, kita mengakhiri cacar, dan bersama-sama kita telah membawa polio ke ambang pemberantasan. Lembaga-lembaga Amerika telah berkontribusi dan mendapat manfaat dari keanggotaan WHO," beber WHO.

Dengan partisipasi Amerika Serikat dan Negara Anggota lainnya, WHO selama 7 tahun terakhir telah

FAKTA-FAKTA PERAN AS DI WHO

Penyumbang Dana Terbesar

- AS menyumbang sekitar 18 persen dana untuk WHO, yang sedang berjuang untuk mengumpulkan dana untuk keadaan darurat kesehatan dari Gaza hingga Ukraina. Anggaran dua tahun badan ini untuk 2024-2025 adalah \$6,8 miliar (sekitar Rp111 triliun).

- Pada periode tersebut, AS mendanai 75 persen program WHO untuk HIV dan penyakit menular seksual lainnya dan lebih dari separuh kontribusi untuk memerangi tuberkulosis, demikian data WHO menunjukkan.

- Sejauh ini AS merupakan donor kesehatan global terbesar di dunia, dengan menyumbangkan \$15,8 miliar pada 2022, menurut Donor Tracker, sebuah platform yang melacak pendanaan pembangunan.

Pengawasan Penyakit

- AS, seperti halnya negara-negara anggota WHO lainnya, merupakan bagian dari jaringan pengawasan influenza global yang diawasi oleh WHO.

- Di antaranya, kelompok ini memberikan saran tentang komposisi vaksin flu musiman tahunan. Di luar pekerjaannya dengan WHO, AS juga mendanai banyak program kesehatan global lainnya.

Penelitian dan Tanggapan

- Badan-badan kesehatan di Amerika Serikat merespons keadaan darurat dan wabah di seluruh dunia, serta menetapkan norma dan standar untuk obat-obatan dan keamanan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) dan CDC.

Vaksin

- Selama pemerintahan Trump yang terakhir, kontribusi untuk kelompok vaksin global Gavi tetap sama seperti di bawah pendahulunya yang berasal dari Partai Demokrat dan penggantinya di Gedung Putih.

AIDS

- AS adalah penyandang dana utama dalam perang melawan HIV. Sebagian besar berasal dari PEPFAR, Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS.

Program ini baru disahkan kembali oleh Kongres selama satu tahun pada tahun lalu setelah adanya klaim dari kalangan konservatif bahwa beberapa penerima dana mendukung aborsi. Otorisasi tersebut akan berakhir pada Maret.

melaksanakan serangkaian reformasi terbesar dalam sejarahnya, untuk mengubah akuntabilitas, efektivitas biaya, dan dampak kami di berbagai negara. (rtr, afp, ist/dya)